



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024**

Jalan Sutan Syahrir No. 189. ☎(0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id-Website : dukcapil.padangpanjang.go.id

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pencatatan Sipil Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil Tujuan : Meningkatnya persentase kepemilikan Akte Kelahiran Anak 0-18 Tahun Program : Pendaftaran Penduduk Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tujuan : Meningkatnya persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tujuan : Publikasi informasi administrasi kependudukan berbagai media informasi	➢ Jumlah penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2023: 62.731 Jiwa (Laki-laki 31.538, Perempuan 31.193) ➢ Jumlah Anak usia 0-18 tahun : 19.844 ➢ Kepemilikan Akte kelahiran anak usia 0-18 tahun : 19.820 ➢ Persentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun 99,88% ➢ Jumlah anak usia 0-17 tahun 18.816 ➢ Jumlah anak yang memiliki KIA 18.322 ➢ Persentase kepemilikan KIA anak usia 0-17 tahun 97,37	Akses : ➢ Peningkatan intensitas informasi dan edukasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan Partisipasi : ➢ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan (akte kelahiran dan KIA) Kontrol : ➢ Pengurusan dokumen kependudukan boleh dibantu oleh orang lain Manfaat : ➢ Tidak adanya sanksi terhadap masyarakat yang belum/tidak memiliki dokumen kependudukan ➢ Akte Kelahiran dan KIA belum/tidak dijadikan dasar persyaratan administrasi untuk anak usia 0-17 tahun seperti halnya KTP bagi penduduk usia 17 Tahun kurang 1 hari keatas	➢ Kurang maksimalnya koordinasi lintas sektor terkait ➢ Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan (Akte Kelahiran dan KIA). ➢ Kurangnya komitmen dari pengambil kebijakan	➢ Keterbalasan waktu untuk mengurus dokumen kependudukan ➢ Merasa tidak penting memiliki akte kelahiran dan KIA ➢ Persyaratan pengurusan akte kelahiran yang tidak lengkap akibat orang tua anak yang menikah secara siri	➢ Semua anak usia 0-18 tahun memiliki akte kelahiran. ➢ Semua anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari memiliki KIA	➢ Melakukan pelayanan langsung ke Kelurahan ➢ Melakukan pelayanan dengan menjemput bahan langsung ke rumah dan setelah jadi dokumen diantar langsung ke rumah (Laskar). ➢ Melakukan pelayanan pembuatan Akte Kelahiran kerumah sakit/klinik bersalin, ➢ Meningkatkan promosi melalui media cetak dan elektronik ➢ Melakukan kerjasama dengan sekolah mulai dari tingkat PAUD s/d tingkat SLTP dalam pelayanan penerbitan KIA ➢ Melakukan kerjasama dengan Toko Buku, Café dan Laundry untuk memberi discount 10% bagi yang memiliki KIA	➢ Persentase kepemilikan Akte Kelahiran usia 0-18 tahun 99,88%. ➢ Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 97,37%	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Input : Rp. 139.668.050 Output : Terpenuhinya persentase kepemilikan Akte Kelahiran Outcome : Semua anak usia 0-18 tahun memiliki dokumen Akte Kelahiran Sub Kegiatan 2 : Peningkatan dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk Input : Rp. 44.392.000 Output : Terpenuhinya persentase kepemilikan KIA anak usia 0-16 tahun Outcome : Semua Anak usia 0-16 tahun memiliki KIA Sub Kegiatan 3 : Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Input : Rp. 90.988.000 Output :

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
								Masyarakat memahami arti penting kepemilikan dokumen kependudukan dan regulasi pengurusannya <u>Outcome :</u> Seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan

Padang Panjang, 2 Mei 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang

 RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

PENELAAHAN DOKUMEN GAP GBS TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH TIM PENGGERAK / DRIVER PPRG BAGI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABID PMSOSBUDPEM PADA BAPPEDA	IRBAN WILAYAH ii PADA INSPEKTORAT	KABID ANGGARAN PADA BPKD	KABID PPPA PADA DINAS SOSIAL PPKBPPPA
 ANTONI ARIF, ST, M. CIO NIP. 19800906 201101 1 002	 YONHENDRIL, SE. Akt. Msi NIP. 19740614 199903 1 005	 LOLA OLHANA, S.E.M.Ec.Dev NIP. 19790811 200212 2 003	 FAIZIL WARDAH, S.Si, ME NIP. 19741111 200212 2 004